

**FUNGSI COORDINATING KELOMPOK MAUJANA  
NAGORI DALAM MENETAPKAN SKALA  
PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI  
DESA BAHUNG HULUAN KABUPATEN  
SIMALUNGUN**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**NILAM PERMATA DEWI DAMANIK**  
**2003100055**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh

Nama : **Nilam Permata Dewi Damanik**  
NPM : 2003100055  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Fungsi Coordinating Kelompok Maujana Nagori Dalam Menetapkan Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bahung Huluan Kabupaten Simalungun

Medan, 27 Mei 2024

Pembimbing

  
**KHAIDIR ALI S.Sos., M.PA**  
**NIDN. 0104089401**

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi

  
**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**  
**NIDN. 0122118801**

Dekan

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**  
**NIDN. 0030017402**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : **Nilam Permata Dewi Damanik**

NPM : 2003100055

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada Hari, tanggal : Kamis, 30 Mei 2024

Waktu : 08:15 WIB s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP** (.....)

PENGUJI II : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si** (.....)

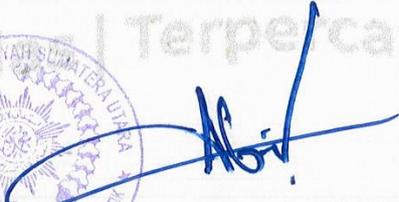
PENGUJI III : **KHAIDIR ALI S.Sos., M.PA** (.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

  
**Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom**



## SURAT PERYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Nilam Permata Dewi Damanik NPM 2003100055, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, dan tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta membatalkan dan penarikan ijazah sarjana dance transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 26 Juni 2024

Yang menyatakan,



**Nilam Permata Dewi Damanik**  
**NPM.2003100061**

## **ABSTRAK**

# **FUNGSI COORDINATING KELOMPOK MAUJANA NAGORI DALAM MENETAPKAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DDESA BAHUNG HULUAN KABUPATEN SIMALUNGUN**

**NILAM PERMATA DEWI DAMANIK**

**2003100055**

Koordinasi merupakan suatu proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan satuan yang telah ditetapkan, dan suatu proses pengembangan dan memelihara hubungan yang baik antar kegiatan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan Kelompok Maujana Nagori yakni dalam hal menyusun dan merencanakan pembangunan untuk dibahas bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi koordinasi Maujana Nagori (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Huluan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksrtiptif dengan analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun faktor penting berjalannya koordinasi yang dilakukan Maujana Nagori (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Huluan dapat dilihat dari adanya kesatuan tindakan diantara Maujana Nagori (BPD), pemerintah desa dan pelaksana pembangunan. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai. Adanya ketaatan dan loyalitas terhadap tugas masing-masing. Adanya koordinator yang bertugas memimpin dan menggerakkan serta memonitor tujuan yang dicapai. Adapun masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi yang dilakukan Maujana Nagori (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Huluan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi koordinasi Maujana Nagori (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Huluan berdasarkan adanya kesatuan tindakan, kesepakatan dan kesatuan pengertian, Ketaatan loyalitas, dan adanya koordinator Dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Huluan berada pada kriteria penilaian cukup baik.

**Kata Kunci :** *koordinasi, pembangunan infrastruktur.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Penulis menyadari bahwa , tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terutama dan paling utama kepada Allah SWT. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Juanda Abdullah Damanik dan ibunda tersayang Saminah serta abangda Hendri Kusumah Damanik Serta seluruh keluarga besar yang penulis banggakan. Do'a dan nasehat dari mereka kiranya dorongan moril yang paling berarti bagi penulis.

1. Bapak Prof Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.AP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos.,M.I.Kom selaku Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Anand Mahardika, S.Sos.,M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Khaidir Ali S.Sos, M.PA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan,serta saran dalam proses penulisan skripsi dalam upaya meningkatkan kualitas anak didik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Dosen serta seluruh Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Seluruh Pegawai Staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis ini.
10. Bapak Udin Bahri Manungkalit, selaku ketua Maujana Nagori ( BPD) di desa Bahung Hulan dan selaku narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

11. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabat-sahabat stambuk 2020 kelas 8A Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Pembangunan atas semua kebaikannya.
12. Kepada Sahabat -sahabat saya Cantika Melya Kholila, Rini Astuti, Hapsah Melisah Hasibuan, Nabila Muntaza Nasution yang telah memberikan dukungan dan menghibur penulis selama pengerjaan skripsi.
13. Kepada Wahyu trima kasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini yang menjadi penyemangat, pendengar, keluh kesah penulis setiap hari, penasehat yang baik, yang selalu memberikan dorongan, yang telah sabar dalam menghadapi penulis, dan yang selalu menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Penulis juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan Ilmu maupun pembaca. penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Medan, 27 Mei 2024

Nilam Permata Dewi Damanik  
2003100055

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
1. Fungsi.....	9
2. Pengertian Coordinating.....	10
3. Tujuan dan Manfaat Koordinasi.....	12
4. Koordinasi Dalam Organisasi Publik.....	13
5. Ciri – Ciri Koordinasi.....	15
6. Cara Mengadakan Koordinasi.....	16
7. Indikator Koordinasi .....	17
8. Badan Permusyawaratan Desa (Maujana Nagori) .....	20
9. Pembangunan Infrastruktur.....	26
10. Infrastruktur Jalan .....	26
11. Perencanaan dan Pembangunan .....	28

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Kerangka Konsep.....	31
3.3 Definisi konsep.....	32
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	33
3.5 Narasumber .....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.7 Teknik Analisis Data .....	37
3.8 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian .....	39
3.9 Deskripsi ringkas objek penelitian .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	45
4.2. Pembahasan.....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>.....</b>
5.1 Simpulan .....	64
5.2 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Populasi Penduduk
Tabel 4.1	Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan Dan Usia
Tabel 4.2	Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.3	Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur
Tabel 4.4	Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3. Pengesahan
- Lampiran 4. Draf Wawancara
- Lampiran 5. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 6. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 7. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran 11. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 12. Surat Keterangan Melalukan Penelitian
- Lampiran 13. Surat LoA Jurnal
- Lampiran 14. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.2 Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang ada di lingkungan masyarakat Simalungun, masyarakat setempat menyebut desa dengan nama lain yaitu Nagori, nama lain dari kepala desa yaitu Pangulu dan nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Maujana Nagori. Masyarakat Simalungun menamakan nama tersebut berdasarkan dengan hak asal – usul, tradisional, dan adat istiadat yang ada di Simalungun dan dihormati masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya terdiri dari perwakilan penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam

keputusan hasil musyawarah kemudian akan dijadikan dasar oleh badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan desa. Badan Permusyawaratan Desa terlibat langsung dalam pembangunan khususnya untuk menyusun rencana pembangunan desa melalui RPJM Desa dan RKP Desa, hal ini diperjelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembangunan Desa dalam prakteknya akan melibatkan banyak unsur. Tingkat keterlibatan banyak unsur tersebut akan terbagi kedalam berbagai varian fungsi dan peranan. Varian fungsi dan peranan tersebut akan menyebabkan perbedaan kepentingan pula. Ketika terjadi perbedaan kepentingan, maka selanjutnya akan berdampak pada terhambatnya tujuan yang akan dicapai. Agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, maka dibutuhkan sebuah koordinasi.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mengenai koordinasi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan pembangunan seharusnya hal-hal teknis menyangkut perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi suatu kendala yang berarti, namun pada kenyataan hal ini belum dapat terkoordinasi dengan baik, oleh karena itu sebagai upaya percepatan pembangunan desa dibutuhkan kemampuan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagori Pasal 1 angka (7) yang menyatakan bahwa Desa adalah desa atau yang disebut dengan Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. angka (8) menyatakan bahwa Pemerintahan Nagori adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Angka (9) menyatakan bahwa Kepala Desa atau yang disebut Pangulu adalah pejabat pemerintah Nagori yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagorinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dan pada angka (11) menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan Maujana Nagori adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagori berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur – unsur atau lembaga – lembaga penyelenggara pemerintahan desa berjalan dengan baik. Jika unsur atau ada bagian dari sistem penyelenggara pemerintahan desa tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan perundang – undangan maka akan menghambat jalannya pemerintahan desa.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 yang menyatakan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau pada masyarakat simalungun disebut Maujana Nagori yaitu:

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa,
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Berdasarkan penjelasan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatas, dapat kita ketahui bahwa BPD atau Maujana Nagori harus menjalankan fungsi dan peranannya dalam membuat, merancang, merumuskan, dan membahas serta menetapkan peraturan nagori bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa atau pangulu.

Anggota dari Maujana Nagori adalah wakil dari penduduk nagori yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah (Huta). Anggota Maujana terdiri dari pemangku adat, tokoh agama, golongan profesi, atau pemuka masyarakat lainnya. Maujana Nagori sebagai lembaga permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat dan dipilih secara demokratis. Diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas pembangunan fisik desa yang dikelola oleh pangulu dapat selaras dengan kemauan masyarakat. Salah satu bidang pembangunan yang sangat penting dan mutlak ditingkatkan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah adalah pembangunan jalan. Dalam hal ini jalan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing global. Transportasi jalan juga semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar-wilayah, antar-kota, dan antar desa, serta mempercepat pengembangan wilayah.

Masih kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh maujana nagori di desa Bahung Hulan Kabupaten Simalungun dalam menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dan mana yang tidak dalam sebuah anggaran pembangunan, maka dengan itu diperlukan skala prioritas dalam pembangunan dimana dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa yang sebenarnya menjadi harapan masyarakat untuk diprioritaskan untuk dilaksanakan tidak terealisasi seperti yang diharapkan masyarakat di Desa Bahung Hulan Kabupaten Simalungun belum tepat sasaran. Infrastruktur jalan yang ada di Desa Bahung Hulan Kabupaten Simalungun adalah kategori” jalan kabupaten” yaitu jalan yang pembangunan dan pemeliharaannya didanai oleh APBD Kabupaten Simalungun. Jalan yang ada di Desa Bahung Hulan pembangunannya belum terlaksana dengan baik, karena sebagian masyarakat belum merasakan pembangunan infrastruktur jalan yang selayaknya sehingga dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah desa Kabupaten Simalungun agar dapat menyelesaikan masalah pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Desa Bahung Hulan, karena masyarakat di Desa Bahung Hulan masih sangat sulit melewati jalan dari desa bahung hulan tersebut untuk menuju kota yang dalam keadaan kurang baik sehingga dibutuhkan peran Maujana Nagori yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur .

Tujuan penelitian ini ialah memberikan kesadaran kepada anggota Maujana Nagori agar lebih menjalankan tugasnya dan bekerja sama dengan baik dengan pemerintah desa untuk mewujudkan desa yang aman dan damai, dan juga memberikan kesadaran akan pentingnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan anggota maujana nagori agar fungsi anggota BPD yang sebenarnya terwujud yaitu salah satunya adalah menerima segala bentuk aspirasi masyarakat, dan untuk mengetahui fungsi coordinating kelompok Maujana Nagori dalam menetapkan skala prioritas pembangunan infrastruktur agar terwujud pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi prioritas tersebut.

Sejauh ini koordinasi yang dijalankan di desa Bahung Hulan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa dan masyarakat masih kurang berjalan dengan baik, seperti terjadinya kesalahan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat terkait dengan pengelolaan pembangunan jalan utama.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengetahui proses koordinasi yang dilakukan Maujana Nagori (Badan Permusyawaratan Desa) terkait dengan skala prioritas pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Hulan. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang dituangkan dengan judul “**Fungsi coordinating kelompok Maujana Nagori dalam menetapkan skala prioritas pembangunan infrastruktur Di Desa Bahung Hulan Kabupaten Simalungun**”.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana fungsi coordinating kelompok Maujana Nagori dalam menetapkan skala prioritas pembangunan infrastruktur Di Desa Bahung Hulan Kabupaten Simalungun?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi coordinating kelompok Maujana Nagori dalam menetapkan skala prioritas pembangunan infrastruktur Di Desa Bahung Hulan Kabupaten Simalungun.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan bagi ilmu pemerintahan khususnya dalam koordinasi pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi pemerintah desa serta Maujana Nagori dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah desa khususnya dalam pelaksanaan dalam skala prioritas pembangunan infrastruktur.
3. Sebagai data tambahan bagi penelitian selanjutnya yang berkeinginan untuk mendalami permasalahan berkaitan dengan koordinasi Maujana Nagori khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur desa.

## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB I pendahuluan berisikan tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian,

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam BAB II berisi, Telaah Pustaka yang merupakan landasan teori yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam BAB III metode penelitian yang berisikan tentang Menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, deskripsi ringkasan objek kajian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam BAB IV ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam BAB V yang menguraikan tentang simpulan dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Fungsi**

Definisi fungsi merupakan kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Fungsi adalah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa fungsi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam organisasi sehingga dapat berguna bagi organisasi tersebut. Pekerjaan tersebut dapat berupa menilai, memeriksa dan sebagainya. Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang disesuaikan berdasarkan wewenang, kewajiban dan tanggungjawab yang di bebankan kepada orang tersebut. Hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan bagi pihak lain atau organisasi.

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Menurut Gie dalam Zainal (2017 : 10), didefinisikan bahwa fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Zainal (2017:22), yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga.

## **2.Pengertian Coordinating**

Coordinating (Koordinasi) adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2011:85). Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Koordinasi dan kinerja adalah dua pengertian yang saling kait-mengkait, karena koordinasi hanya dapat dicapai sebaik-baiknya dengan melakukan kinerja yang efektif. Kinerja pegawai adalah bentuk komunikasi administrasi, yang membantu tercapai koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada kinerja ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdayaguna (efisien dan efektif).

Koordinasi dalam suatu organisasi merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan dalam arti pasif berupa membuat aturan mengenai segala gerak dan kegiatan dan kinerja antara atasan dan bawahan yang mempunyai tugas dan kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lainnya, pengaturan mana bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan kegiatan saling bertindih yang dapat mengakibatkan pemborosan dan pengaruh tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.

Handoko (2016 : 193) menuliskan, Koordinasi (coordination) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan

yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Brech dalam Hasibuan (2011:85), Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang efektif.

Menurut Suharto(2012:94), “Koordinasi merupakan suatu kegiatan yang rumit, apa lagi pelaksanaannya di lapangan. “ Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas, dapat ditarik benang merah bahwa yang dimaksud dengan koordinasi ialah proses pengaturan, memadukan atau pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Setelah mengetahui pengertian koordinasi menurut para ahli dan secara umum maupun khusus maka hal yang perlu diketahui selanjutnya adalah tujuan koordinasi. Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Berikut tujuan koordinasi yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tersebut:

1. Meraih dan menjaga fektifitas organisasi seoptimal mungkin dengan sinkronisasi, kebersamaan, keselarasan dan keseimbangan diantara aktivitas yang saling bergantung/berkaitan.

2. Melakukan pencegahan terhadap timbulnya konflik serta menciptakan efisiensi yang optimal pada berbagai aktivitas yang interdependen melalui kesepakatan yang mengakomodir seluruh elemen yang berkaitan.
3. Koordinasi berusaha untuk menciptakan dan menjaga agar suasana dan tingkah laku yang ada saling merespon dan mengantisipasi di setiap unit kerja baik yang berkaitan maupun tidak. Hal ini supaya kesuksesan setiap unit tidak mengganggu atau diganggu oleh unit lainnya. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dengan jaringan komunikasi dan informasi yang efektif.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan suatu proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan satuan yang telah ditetapkan, suatu proses pengembangan dan memelihara hubungan yang baik antar kegiatan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

### **3. Tujuan dan Manfaat Koordinasi**

Handoko (2009:362) menyebutkan tujuan dan manfaat dari koordinasi itu sendiri, sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi) agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
- b. Memecahkan konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait.
- c. Agar manajer mampu mengintegrasikan dan mensinkronkan pelaksanaan tugas-tugasnya dengan stakeholders pendidikan yang saling bergantung,

semakin besar ketergantungan dari unit-unit, semakin besar pula kebutuhan pengkoordinasian.

- d. Agar manajer mampu mengintegrasikan kegiatan fungsional dan tujuan-tujuan dari unit organisasi yang terpisah-pisah untuk mencapai tujuan bersama dengan sumberdaya yang terbatas secara efektif dan efisien.
- e. Adanya pembagian kerja dimana semakin besar pembagian kerja, semakin diperlukan pengkoordinasian/penyerasian sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih pekerjaan yang menyebabkan pemborosan.
- f. Untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dan harmonis di antara kegiatan-kegiatan, baik fisik maupun nonfisik dengan para stakeholder.
- g. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan sumberdaya yang terbatas.
- h. Mencegah terjadinya konflik internal dan eksternal organisasi yang kontra produktif.
- i. Mencegah terjadinya kekosongan ruang dan waktu, serta persaingan yang tidak sehat.

#### **4. Koordinasi Dalam Organisasi Publik**

Menyinggung tentang organisasi berarti membahas tentang sebuah kelompok, dimana kelompok tersebut biasanya memiliki atasan dan juga bawahan, dimana bawahan tersebut dipimpin oleh atasan untuk mencapai sebuah tujuan. Organisasi memiliki struktur tertentu, tujuan, saling berhubungan satu bagian dan bagian lainnya dan tergantung kepada komunikasi manusia untuk

mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya.

Koordinasi mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Banyak sekali instansi yang memiliki kegiatan sejenis namun tidak terkoordinasi dengan baik. Masalah ini juga terjadi dalam hubungan antar unit dalam organisasi. Beberapa unit dalam satu organisasi memiliki kegiatan serupa tanpa bisa dikendalikan oleh pimpinan. Kondisi ini dapat semakin parah apabila tidak dikoordinasikan dari semenjak perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi,

Koordinasi secara umum, merupakan "tali pengikat" dalam organisasi dan manajemen yang menghubungkan peran para aktor dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, adanya koordinasi dapat menjamin pergerakan organisasi ke arah tujuan bersama. Tanpa adanya koordinasi, semua pihak dalam organisasi akan bergerak sesuai dengan kepentingannya namun terlepas dari peran bagian lainnya dalam organisasi dan peran masing-masing bagian tersebut belum tentu untuk mencapai tujuan bersama.

## 5. Ciri – Ciri Koordinasi

Menurut Handayani (2011:118), ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab
2. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama
3. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (continues process)
4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur
5. Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi

Seorang pemimpin merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap koordinasi. Untuk dapat menjalankan koordinasi dengan baik, dibutuhkan suatu kerjasama dari setiap komponen organisasi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki ciri yaitu suatu proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan tindakan yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab terletak pada pimpinan.

Bentuk – Bentuk Koordinasi Pola koordinasi yang ada dalam organisasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu koordinasi Vertikal (ke atas dan Kebawah) dan Koordinasi Horizontal (setara) Di kedua jenis koordinasi ke atas maupun ke bawah, manajemen mengendalikan sistem koordinasinya. Para manajer memiliki waktu, keahlian, dan fasilitas untuk memperbaiki koordinasi yang ada di organisasi. Menurut Syafie (2011:35), bentuk bentuk Koordinasi adalah:

1. Koordinasi vertikal adalah kegiatan – kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit – unit, kesatuan –

kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasikan semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasikan vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.

2. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat .

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki ciri yaitu suatu proses dalam melakukan kerjasama yang merupakan konsep kesatuan tindakan yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab terletak pada pimpinan.

### **6.Cara Mengadakan Koordinasi**

Menurut Hasibuan (2011:88) terdapat beberapa cara-cara mengadakan koordinasi adalah:

- a. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.
- b. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan sendiri-sendiri.

- c. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saransaran, dan lain sebagainya.
  - d. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran.
  - e. Membina *human relation* yang baik antara sesama pegawai
  - f. Manajer sering melakukan komunikasi informasi dengan para bawahan.
- Ringkasnya suatu koordinasi akan lebih baik jika memperoleh dukungan.

### **7.Indikator Koordinasi**

Koordinasi tidak hanya dilakukan dalam ruang lingkup satu negara tetapi juga lintas negara sebagaimana telah banyak dipraktekan oleh perusahaan-perusahaan multi-nasional. Dapat dibayangkan, betapa sulitnya proses manajemen sumber daya yang tersebar di berbagai negara tanpa adanya koordinasi. Tanpa koordinasi maka sumber daya yang tersebar tersebut tidak dapat dikelola secara efektif dan efisien. Prinsip koordinasi juga harus terefleksikan dalam organisasi public/pemerintahan maupun organisasi kesewadayaan masyarakat. Dalam organisasi publik, sumberdaya yang digunakan tidak sedikit.

Indikator dalam penelitian ini diambil dari faktor–faktor yang mempengaruhi koordinasi tersebut, yang digunakan sebagai tolak ukur koordinasi kinerja pegawai. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2018:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

1. Kesatuan Tindakan
2. Komunikasi

3. Pembagian Kerja

4. Disiplin

### **7.1. Kesatuan Tindakan**

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

### **7.2. Komunikasi**

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan”.

Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas

kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan
- b. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan
- c. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain.

Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikannya kepada orang tersebut.

### **7.3.Pembagian Kerja**

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan terorganisasi dapat

mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi.

#### **7.4. Disiplin**

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

#### **8. Badan Permusyawaratan Desa (Maujana Nagori)**

Berdasarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 pasal 11 menyatakan bahwa pemerintah desa itu terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD). Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan lembaga eksekutif sedangkan Maujana Nagori (BPD) sebagai lembaga legislatif desa. Dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Nagori (Desa) menyebutkan bahwa Maujana Nagori merupakan unsur pemerintahan tertinggi

desa, dan Maujana Nagori adalah lembaga yang merupakan bentuk perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagori.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Keberhasilan dari suatu pemerintahan terletak pada pemerintahannya sendiri, dalam hal ini pemerintah telah membuat Undang-undang mengenai pemerintahan desa, salah satunya adalah PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, yang isinya menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Hakikatnya, Maujana Nagori dan pangulu memiliki kedudukan yang sama yaitu merupakan lembaga desa, namun keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Pangulu berfungsi sebagai pemimpin masyarakat sedangkan Maujana

Nagori berfungsi seperti apa yang sudah dijelaskan diatas. Anggota dari Maujana Nagori adalah wakil dari penduduk nagori yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah (Huta). Anggota Maujana terdiri dari pemangku adat, tokoh agama, golongan profesi, atau pemuka masyarakat lainnya. Maujana Nagori sebagai lembaga permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat dan dipilih secara demokratis. Diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas pembangunan fisik desa yang dikelola oleh pangulu dapat selaras dengan kemauan masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa dalam hal ini kepala desa tidak merencanakan sendiri perencanaan pembangunan tersebut tanpa melibatkan lembaga lain. Lembaga yang paling berpengaruh untuk menampung aspirasi masyarakat adalah Badan Permusyawaratan Desa, maka seharusnya kepala desa sebagai kepala tertinggi Pemerintahan Desa harus bekerja sama dengan BPD tersebut dalam menetapkan perencanaan pembangunan desa, serta harus mengikut sertakan masyarakat.

Perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara

pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau pada daerah Kabupaten Simalungun disebut dengan Maujana Nagori mempunyai fungsi :

1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dalam pembuatan Peraturan Desa baik peraturan yang dibuat dari BPD maupun Kepala Desa dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa. Dimana rancangan yang dibuat oleh Kepala Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam sebuah rapat atau musyawarah untuk mendapatkan persetujuan dari BPD. demikian juga sebaliknya, apabila rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh BPD maka harus di musyawahkan dan dimintakan persetujuan dari Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan Peraturan Desa.
2. Menampung, menggali, menghimpun, merumuskan dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam pemerintahan desa, salah satunya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Usulan – usulan dari masyarakat tersebut harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah usulan tersebut mencakup

keperluan seluruh masyarakat desa atau hanya dari satu golongan tertentu guna memenuhi kepentingan mereka sendiri. Dari hal tersebut, BPD harus cepat dan tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat. dan setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa perubahan yang positif bagi semua masyarakat desa.

3. Melakukan Pengawasan kinerja Kepala Desa, fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan kinerja Pangulu sangat penting guna memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Sunarti, 2018). Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mencegah adanya penyelewengan atas kewenangan yang dilakukan Pangulu.

Maujana Nagori (BPD) merupakan bentuk perwujudan demokrasi yang ada di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa harus selalu memperhatikan segala aspek termasuk aspirasi dari masyarakat, dimana Maujana Nagori ini merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa dan merupakan lembaga legislatif yang ada di desa.

Menurut (Nurcholis, 2011) mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak:

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat
- c. Mengajukan rancangan peraturan desa
- d. Mengajukan pertanyaan

- e. Menyampaikan asal – usul pendapat
- f. Memilih dan dipilih
- g. Memperoleh tunjangan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban:

- a) Mengamalkan pancasila
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa
- c) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e) Memproses pemilihan Kepala Desa

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

## **9.Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat

dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan infrastruktur termasuk kedalam pembangunan fisik dan sudah sejak lama diketahui, bahwa keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang.

#### **10. Infrastruktur Jalan**

Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi baik di wilayah desa hingga wilayah kota, infrastruktur jalan merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari satu zona pasar ke zona pasar lainnya yang menyebabkan perputaran ekonomi makin pesat. Wahyuni (2009) apabila prasarana jalan rusak dan buruk alokasi sumber daya menjadi terhambat, pendistribusian faktor produksi, pembangunan industri, jasa dan barang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat pendapatan.

Menurut undang-undang nomor 38 (2004), dari segi fungsinya jalan umum dibedakan menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, dan kecepatan rata-rata tinggi. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang. Jalan lokal merupakan jalan umum

yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Pembangunan infrastruktur termasuk kedalam pembangunan fisik dan sudah sejak lama diketahui, bahwa keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang.

Disamping sebagai alat yang dapat menghubungkan antar daerah di Indonesia, infrastruktur yang biasa sering disebut sebagai sarana dan pra sarana fisik ini, memiliki keterkaitan yang kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut ditandai dengan wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik mengakibatkan timbulnya permasalahan social seperti penolakan dari masyarakat terhadap infarastruktur yang telah terbangun.

## **11. Perencanaan dan Pembangunan**

Sudah merupakan suatu keharusan bagi setiap organisasi yang akan mewujudkan suatu tujuan selalu memulai tahap perencanaan dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan merupakan tahap awal dari suatu proses pembangunan. Melalui perencanaan akan dapat ditentukan apa yang akan

dilaksanakan, tujuan yang hendak dicapai, sasaran yang dipergunakan dan sebagainya.

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian tersebut dapat diuraikan komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan apa yang dilakukan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Dengan demikian, suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan.

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Maka dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan atau usaha yang terorganisir dalam mencapai tujuan diperlukan perencanaan.

Menurut Wijayanto (2012:75) mendefinisikan perencanaan (*planning*) merupakan proses menetapkan tujuan dan memilih cara untuk merealisasikan tujuan tersebut. Setiap organisasi tidak dapat lepas dari proses perencanaan.

Siagian dalam Anggara dan Sumantri (2016:20) menjelaskan bahwa pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar, yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi,

sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi. Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi. Menurut Sugiyono (2019: 206) penelitian deskriptif (descriptive research) merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Data deskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Data-data yang dikumpulkan nantinya berupa teks, kata-kata, dan gambar. Dalam mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan pengamatan

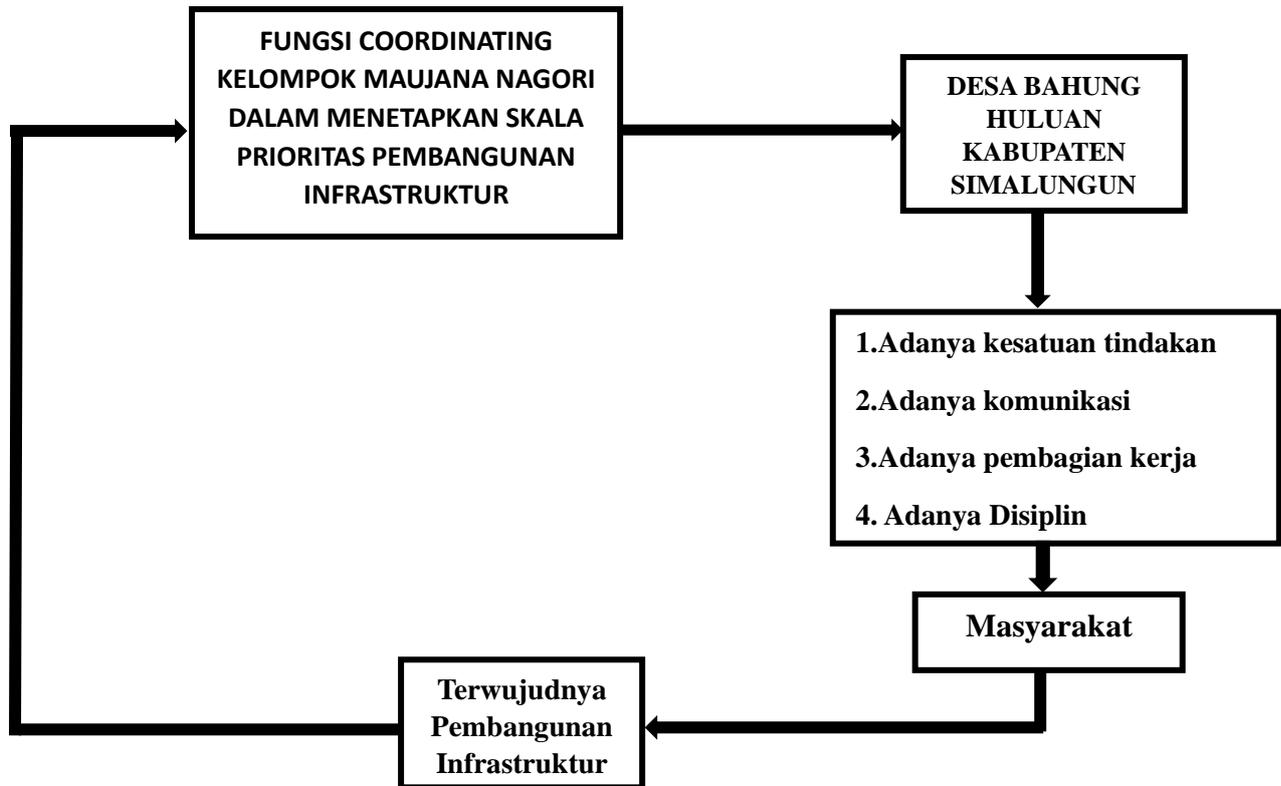
lapangan, teknik wawancara kemudian dokumentasi berdasarkan permasalahan yang ada. Informan merupakan orang yang dijadikan penulis sebagai sumber informasi penelitian untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Adapun informan penelitian diambil berdasarkan sengaja yang menurut penulis dapat menjawab permasalahan yang ada.

Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, wawancara sebagai strategi utama dalam mengumpulkan data. Pada konteks ini, catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkrip wawancara. Kedua, wawancara sebagai strategi penunjang teknik lain dalam mengumpulkan data, seperti observasi partisipan, analisis dokumen, dan fotografi.

### **3.2.Kerangka Konsep**

Kerangka konsep yang akan dideskripsikan dan digambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi yang dilakukan Maujana Nagori (Badan Permusyawaratan Desa) dalam penyelenggaraan skala prioritas pembangunan infrastruktur desa apakah sudah berjalan dengan baik.

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka kerangka konsep yang digambarkan dan disusun dalam sebuah model teoritis seperti apa yang digambarkan dalam bagan pada halaman berikut ini:



### 3.3. Definisi konsep

Secara etimologis, istilah konsep berasal dari kata *conceptum* yang berarti sesuatu yang dipahami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Ia juga berarti sebuah gambaran mental dari obyek, proses, pendapat, atau apapun yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan diteliti.

- a) Koordinasi merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik antar kegiatan, baik

itu kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik. Dan menghasilkan kesamaan tindakan terhadap tujuan yang akan dicapai.

- b) Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislative ditingkat desa yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara demokrasi atau memperhatikan aspirasi dari masyarakat.
- c) Desa merupakan pemerintahan terkecil dari suatu Negara yang penduduknya saling mengenal, mempunyai adat istiadat yang sama, dan memiliki tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

#### **3.4.Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi bertujuan untuk menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini menurut teori Sugandha (2014:47- 48) yaitu:

- a. Adanya kesatuan tindakan
- b. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai.
- c. Adanya ketaatan dan loyalitas terhadap tugas masing-masing.
- d. Adanya koordinator yang bertugas memimpin dan menggerakkan serta memonitor tujuan yang akan dicapai.

### 3.6. Narasumber

Setiap penelitian berhadapan dengan masalah sumber data yang disebut Informan penelitian. Di dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu harus ditentukan informan penelitian yang dapat disajikan sumber informasi. Dengan penelitian kualitatif informan penelitian dipilih secara “*Purposive*” berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 3.1 Informan penelitian**

No	Nama Narasumber	Usia	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin
1.	Udin Bahri Manungkalit	55 Tahun	Ketua Maujana nagori	SMA	Laki-Laki
2.	Anuar Damanik	48 Tahun	Kepala Desa	SMA	Laki-Laki
3.	Syafrudin	47 Tahun	Kaur Pembangunan	SMP	Laki-Laki
4.	Rahmat Hamdani	39 Tahun	PDTI	SMA	Laki-Laki
5.	Adi Priyanto	35 Tahun	Masyarakat	S1	Laki-Laki

### Deksripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pegawai kantor Desa Bahung Hulu dan ketua Maujana Nagori. Adapun keadaan narasumber adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Keadaan narasumber berdasarkan jabatan dan usia**

NO	NAMA	JABATAN	USIA
1.	Anuar Damanik	Kepala Desa	48 Tahun
2.	Udin Bahri Manungkalit	Ketua Maujana Nagori(BPD)	55 Tahun
3.	Syafrudin	Kaur Pembangunan	47 Tahun
4.	Rahmat Hamdani	PDTI	39 Tahun
5.	Adi priyanto	Masyarakat	35 Tahun

Sumber:Hasil Penelitian,2024

### Distribusi Narasumber

**Tabel 4.2**

**Distribusi Narasumber berdasarkan jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1.	Laki-Laki	5	100%
2.	Perempuan	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

Sumber:Hasil Penelitian,2024

Distribusi berdasarkan kelamin akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang atau 100 % sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 0 orang atau 0 %.

Distribusi Narasumber berdasarkan jenis umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1.	20-29 Tahun	0	0
2.	30-39 Tahun	2	40%
3.	40-49 Tahun	2	40%
4.	50-59 Tahun	1	20%
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

Sumber:Hasil Penelitian,2024

Distribusi narasumber menurut umur dari 5 narasumber yang berumur 30-39 tahun dan 40-49 tahun menjadi mayoritas dengan masing-masing 2 orang atau sebesar 40 %. Sedangkan yang berumur 50-59 tahun sebanyak 1 orang atausebesar 20 %.

Distribusi Narasumber berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1.	S1	1	20%
2.	SMA	4	80%
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

Sumber:Hasil Penelitian,2024

Berdasarkan data diatas, yang memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 4 orang atau sebesar 80 % dan yang berpendidikan S-1 sebanyak 1 orang atau sebesar 20 %. Jadi, berdasarkan hasil data diatas dapat dikatakan narasumber yang paling dominan berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu SMA.

### **3.7. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni:

#### **1.Data Primer**

Data yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden yang berkaitan dalam penelitian dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

#### **2.Data Sekunder**

Pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang ada yang diteliti dan diperoleh dari buku atau penelitian kepustakaan, untuk mendukung penelitian ini.

### **3.8.Teknik Analisis Data**

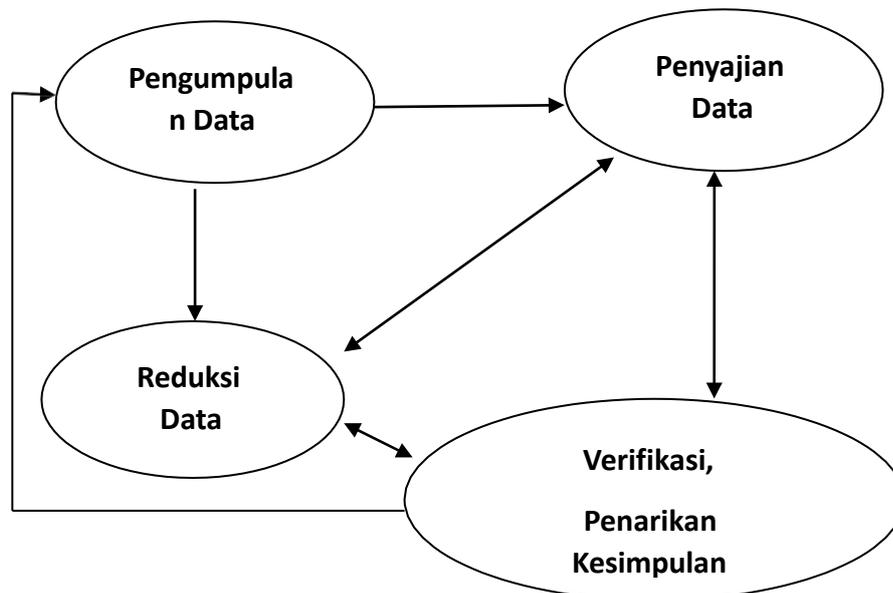
Analisis menurut Anggara (2015:141) adalah mengelompokkan, membuat urutan, memanipulasi serta menyingkatkan temuan data sehingga mudah untuk dibaca. Bogdan dalam Sugiyono (2013:244) analisis data adalah proses mencari

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Martono (2015:10) analisis data merupakan suatu tahap yang bermanfaat untuk menerjemahkan data hasil penelitian agar lebih mudah dipahami pembaca secara umum.

Miles dan Huberman dalam Martono (2015:11) menjelaskan secara umum, proses analisis data kualitatif melibatkan empat proses penting. Keempat proses penting tersebut digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 3.7**

**Teknik Analisis Data**



Data Reduction atau reduksi data. Yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, mengabstrakan, dan perubahan kata kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada dilapangan. Proses ini berlangsung

terus menerus. Banyak informasi yang diperoleh oleh penulis, namun tidak semua informasi tersebut berguna atau memiliki kontribusi dalam mengungkap masalah penelitian. Untuk itulah, reduksi data perlu dilakukan setiap saat sedikit demi sedikit, karena bila proses ini dilakukan diakhir penelitian, semakin banyak informasi yang akan disaring.

Data Display atau penyajian data, yaitu aktivitas menyajikan data hasil penelitian sehingga memungkinkan penulis mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh.

Conclusion drawing atau verifikasi merupakan aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya. Simpulan ini dapat berupa simpulan sementara atau simpulan akhir (final).

Menurut Creswell dalam Martono (2015:12), aktivitas mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyusun laporan bukanlah proses yang harus dilakukan secara berurutan dalam penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku dan sumber lain. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data agar peneliti mampu menggali informasi lebih dalam mengenai tafsiran ataupun jawaban dari individu-individu yang diteliti.

### **3.9. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Desa Bahung Huluan, Kabupaten Simalungun dan waktu penelitian selama 3 bulan (tgl 22 Maret -10 Mei Tahun 2024).

### 3.9.1. Visi dan Misi

#### Visi

Mewujudkan Nagori Bahung Hulan sebagai Nagori yang makmur di Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun.

#### Misi

1. Membangun rumah sarana dan prasaran infrastruktur
2. Membangun sumber perekonomian masyarakat
3. Mengembangkan bidang pertanian dan peternakan
4. Membangun sumber daya manusia
5. Menciptakan lapangan kerja

**Tabel 3.1 Populasi Penduduk**

NO	Nama Huta	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	
			Laki-Laki	Perempuan
1.	Huta 1	138	217	202
2.	Huta 2	79	132	130
3.	Huta 3	82	102	120
4.	Huta 4	22	41	46
5.	Huta 5	50	78	74
<b>Jumlah</b>		<b>371</b>	<b>570</b>	<b>572</b>

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

### **3.10. Deskripsi ringkas objek penelitian**

#### **Tugas pokok dan Fungsi**

##### **a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Tugas Pokok dan Fungsi a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam permendagri No. 110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu

- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- j. Melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintahan Desa dan lembaga desa lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Kepala Desa

Kepala desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa. Kedudukan kepala desa berada langsung di bawah Bupati dan ia bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat. Fungsi dan tugas dari kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa.

c. Kepala Urusan Pembangunan

Sama seperti Kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan juga merupakan salah satu unsur sekretariat desa yang memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan pembangunan memiliki tugas-tugas yakni sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kepala desa baik di bidang teknis maupun administrasi, membantu pembinaan perekonomian desa, dan mengajukan pertimbangan terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pembangunan desa kepada kepala desa.

#### d. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditempuh melalui upaya pendampingan. Pendampingan menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) pada program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) mempunyai tugas pokok dan fungsi mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bidang infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas kader desa teknis, fasilitasi pembangunan yang berskala lokal desa, diantaranya sebagai berikut.

#### **Tugas Pokok**

1. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknik dan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhususan setempat.
2. Memberikan bimbingan teknis dalam pembuatan desain dan RAB.
3. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa.
4. Fasilitasi sertifikasi infrastruktur desa hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
5. Fasilitasi koordinasi pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa/ antardesa dengan sektor atau pihak lain yang terkait.

#### **Indikator**

1. Tersedianya data kader-kader teknik desa yang telah terlatih.
2. Terlaksananya pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa.
3. Tersedianya desain dan RAB untuk setiap kegiatan pembangunan sarana prasarana desa.
4. Tersedianya jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa.
5. Terfasilitasinya pembentukan dan pelatihan Tim Pelaksana, Tim Lelang, Tim Pemelihara, dan Tim Monitoring.
6. Terfasilitasinya proses survey harga dan lokasi, pengadaan barang dan jasa serta pengadaan tenaga kerja setempat.
7. Tersedianya papan informasi kegiatan.
8. Tersusunnya Perdes tentang pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana desa (bekerjasama dengan PD Pemberdayaan).
9. Semua infrastruktur hasil kegiatan pembangunan di desa di sertifikasi.
10. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan sarana prasarana desa/ antardesa.
11. Tersedianya informasi pembangunan sarana prasarana desa/ antardesa.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana koordinasi kelompok Anggota Maujana Nagori dalam menetapkan skala prioritas pembangunan infrastruktur di Desa Bahung Hulan, Kabupaten Simalungun. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 orang informan penelitian yang terdiri atas 4 orang aparat desa di desa Bahung Hulan dan 1 orang tokoh masyarakat di desa Bahung Hulan.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua minggu.

## **Hasil Wawancara**

Wawancara adalah proses yang tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan - pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan di dalam penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

### **a. Adanya Kesatuan Tindakan**

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan

tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Udin Bahri Manungkalit selaku ketua Maujana Nagori(BPD) desa Bahung Huluan pada hari Kamis 09 Mei 2024 yang menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan tindakan yang kami lakukan sebagai kelompok Maujana nagori lakukan yaitu melakukan pengawasan dan perencanaan dalam pembangunan itulah tindakan yang utama kami lakukan mulai dari tahap pertama,tambahan,dan sampai akhir penyelesaian pembangunan infrastruktur,dan juga kami sebagai kelompok maujana nagori dalam mengambil suatu tindakan tidak pernah dalam sepihak saja tetap sesuai alurnya seiring dan sejalan,hambatan selama melakukan pembangunan tidak ada bentrok atau apapun,makanya dibutuhkan koordinasi antara perangkat desa dengan maujana nagori dengan masyarakat agar tidak terjadi salah paham antar kelompok maujana nagori dengan masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anuar Damanik selaku Kepala Desa Bahung Huluan pada hari Kamis 09 Mei 2024 yang menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan suatu tindakan biasanya ketika ada pembangunan infrastruktur seperti jalan di desa ini saya mengadakan sosialisasi dahulu kepada masyarakat,kemudian maujana nagori menyampaikan aspirasi masyarakat apa saja sehingga dapat saya tampung dan saya benahi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rahmat Hamdani selaku Tim PDTI (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) desa Bahung Huluan pada hari Rabu 08 Mei 2024 yang menyatakan bahwa:

“Kelompok maujana nagori Alhamdulillah sudah sangat baik dalam berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam memulai suatu perencanaan pembangunan infrastruktur,tapi masih banyak masyarakat yang ikut serta

dalam perencanaan pembangunan, masyarakat masih acuh tak acuh terhadap pembangunan yang dilaksanakan di desa bahung huluan ini."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syafrudin selaku Kaur Pembangunan Desa Bahung Huluan pada hari Jum'at 10 Mei 2024 yang menyatakan bahwa:

"Sejauh ini kesatuan tindakan berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh sering berkoordinasinya Maujana Nagori dan pemerintah desa tentang rencana pembangunan yang akan dilakukan. Dimulai dari menjangring aspirasi dari masyarakat dengan musyawarah dusun kemudian musyawarah desa. Kesatuan tindakan juga dilaksanakan dengan baik oleh Tim pelaksana kegiatan, masyarakat dan pemerintah desa".

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Adi Priyanto selaku tokoh masyarakat Desa Bahung Huluan pada hari Jum'at 10 Mei 2024 yang menyatakan bahwa:

"Sejauh ini kesatuan tindakannya berjalan dengan baik. Maujana Nagori dan pemerintah desa selalu terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian berkoordinasi untuk merencanakan pembangunan yang bermanfaat besar untuk masyarakat. Maujana Nagori selama ini juga sudah mengambil aspirasi dari bawah mulai dari tingkat dusun dengan musyawarah dusun dan selanjutnya musyawarah desa".

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa Kelompok Maujana Nagori (BPD) dan pemerintah desa sudah melakukan kesatuan tindakan dengan baik. Dalam perencanaan pembangunan sudah melakukan koordinasi untuk mensosialisasikan rencana pembangunan yang akan dilakukan. Kemudian mengambil aspirasi langsung dari masyarakat melalui musyawarah dusun, selanjutnya dibawa kedalam musyawarah desa. Pada tahap pembangunan Maujana Nagori dan pemerintah desa sudah melakukan

pengawasan terhadap proses pembangunan yang ada. Walaupun pada proses pemecahan masalah dalam pembangunan pemerintah desa terkesan sendiri dan tidak melibatkan Maujana Nagori bahkan tidak mengikuti prosedur yang ada.

#### **b. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Udin Bahri Mnaungkalit selaku ketua Maujana Nagori BPD desa Bahung Huluan pada 09 Mei 2024 hari Kamis yang menyatakan bahwa :

“Kalau kami dalam mencapai kesepakatan dan kesatuan itu ya harus saling kerja sama, tidak egois dan jujur-jujur aja dalam mengambil kesepakatan, dan melakukan musyawarah, untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan yang ditujukan untuk masyarakat.”  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anuar

Damanik selaku Kepala Desa Bahung Huluan pada hari Kamis 09 Mei 2024 yang menyatakan bahwa:

“kesepakatan yang biasa saya ambil dengan kelompok Maujana Nagori itu seperti dimana tempat pembangunan itu dilaksanakan, dan jenis bangunan apa yang akan kami bangun, dan dalam pengambilan kesepakatan ini kelompok maujana nagori selalu hadir dan berkoordinasi dengan saya”  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rahmat

Hamdani selaku Tim PDTI (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) desa Bahung Huluan pada hari Rab 08 Mei 2024 yang menyatakan bahwa:

“Dalam mengambil kesepakatan dan kesatuan pengertian dimulai dari perkumpulan musyawarah mulai dari tingkat dusun kemudian naik ke level desa yang dirangkum oleh BPD. Kemudian rangkuman usulan tersebut diantarkan ke kepala desa sehingga kepala desa memahami apa pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan musyawarah mufakat bersama tokoh masyarakat bertujuan untuk menentukan pembangunan yang akan dilakukan. Pembangunan yang akan dilakukan didasari pada RPJMDes dan anggaran yang tersedia.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syafrudin selaku Kaur Pembangunan Desa Bahung Huluan pada hari Jum'at 10 Mei 2024 yang menyatakan bahwa:

“Biasanya saya sebagai kaur pembangunan dalam pengambilan kesepakatan dalam pembangunan infrastruktur ya tinggal di sesuaikan saja dengan rencana pembangunan sebelumnya, dan juga dengan musyawarah dalam mengambil kesepakatan bersama agar tidak ada yang salah paham antar semua pemerintah desa.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andi Priyatno selaku tokoh masyarakat Desa Bahung Huluan pada hari Jum'at 10 Mei 2024 yang menyatakan bahwa :

“Dalam pengambilan keputusan dan kesepakatan ditentukan oleh bentuk bangunan dan lokasi pembangunan, agar pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan dan dianggarkan. Tidak lupa pula bahwa pembangunan yang akan dilakukan haruslah yang paling prioritas atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat”.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. Melalui musyawarah dusun kesepakatan diambil dari bawah dengan menggali aspirasi masyarakat. Kemudian membawanya pada musyawarah desa untuk mengambil kesepakatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Kesepakatan juga didasari pada RPJMDes, anggaran yang tersedia dan bangunan prioritas. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat sepakat bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus bermanfaat lebih dan sangat dibutuhkan.

### **c. Adanya Ketaatan dan Loyalitas**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Udin Bahri Manungkalit selaku ketua Maujana Nagori (BPD) Desa Bahung Hulan pada hari Kamis 09 Mei 2024 yang menyatakan bahwa:

“Ketaatan loyalitas kami ini belum maksimal ,karena kinerja kami masih ada yang belum dijalankan dengan baik dan sesuai,tapi dalam pembangunan infrastruktur ini sering terjadi ketidakpahaman antara para pelaksana pembangunan tetapi Kelompok Maujana Nagori selalu berkoordinasi tentang apapun ke Pemerintah desa,sebaliknya tidak dengan pemerintah desa.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anuar Damanik selaku Kepala Desa Bahung Hulan pada hari Kamis 09 Mei 2024 yang menyatakan bahwa :

“Ketaatan loyalitas yang kami lakukan Alhamdulillah sudah baik,semua Pemerintah desa sudah menjalankan tugasnya masing-masing,dan saya selalu memantau aparat desa dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam hal pembangunan infrastruktur ini .”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rahmat Hamdani selaku Tim PDTI (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) desa Bahung Hulan pada hari Rabu 08 Mei 2024 yang menyatakan bahwa:

“Tentang kepatuhan dan keputusan yang telah diambil sejauh ini semakin membaik. Yaitu adanya peningkatan tepat sasaran pembangunan yang dijalankan. Para aparaturnya juga sudah menjalankan sesuai dengan fungsinya walaupun masih ada sedikit yang tumpang tindih. Maujana Nagori juga sudah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Hulan. Sejauh ini masalah yang muncul berasal dari eksternal pelaksana pembangunan, yaitu faktor cuaca yang sudah mengganggu proses pembangunan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syafrudin selaku Kaur Pembangunan Desa Bahung Huluan pada hari Jum'at 10 Mei 2024 yang menyatakan bahwa:

“Kepatuhan akan keputusan yang telah diambil bersama sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Karena para pelaksana sudah menjalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andi Priyanto selaku tokoh masyarakat Desa Bahung Huluan pada hari Jum'at 10 Mei 2024 yang menyatakan bahwa:

“Sejauh ini kepatuhan akan keputusan yang sudah diambil bersama berjalan dengan baik. Para pemangku kepentingan dan pihak yang terlibat sudah menjalankan keputusan-keputusan dengan baik. Maujana Nagori juga selalu mengingatkan kepada aparaturnya agar menjalankan pembangunan sesuai dengan yang sudah direncanakan”. Masalah aparaturnya jarang terjadi, masalah utama pembangunan infrastruktur di desa Bahung Huluan adalah akses jalan. Selain dari masalah tersebut masih berjalan dengan lancar dan sesuai.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa adanya ketaatan dan totalitas Maujana Nagori dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Huluan. Maujana Nagori sudah menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan selalu mengingatkan pelaksana pembangunan agar melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Hal ini mengakibatkan pelaksana pembangunan merasa diawasi, dan melaksanakan pembangunan sesuai rencana. Walaupun masih kurangnya pemahaman pelaksana pembangunan yang mengakibatkan masih adanya tumpang tindih, dan proses pembangunan kurang dijalankan sesuai dengan seharusnya.

#### d. **Adanya Koordinator**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Udin Bahri Manungkalit selaku ketua Maujana Nagori (BPD) pada hari Kamis 09 Mei 2024 yang menyatakan bahwa:

“Koordinasi yang dilakukan harus didasarkan kerja sama antar kelompok maujana nagori dengan pemerintah desa agar terjadi koordnasi yang baik,kami selalu berkoordinasi dengan kepala desa terkait perencanaan pembangunan infrstruktur di desa ini agar pembangunan infrstruktur desa berjalan dengan prosedur yang ada.Dan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur itu ada pemerintahan desa didalamnya ada Kepala Desa,Maujana Nagori, Kaur Pembangunan, PDTI (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) dan masyarakat desa yang terlibat aktif pada saat pembangunan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anuar Damanik selaku Kepala Desa Bahung Huluan pada hari Kamis 09 Mei 2024 yang menyatakan bahwa:

“Biasanya kami dalam melakukan koordinasi semua tim pembangunan infrastruktur desa harus wajib hadir dalam melakukan koordinasi yang kami lakukan di kantor Lurah ini.Seperti Rancangan Anggaran Biaya,apa-apa saja yang diperlukan dalam melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur desa dan lainnya,agar terlaksana dengan baik kami juga menanyakan kepada masyarakat apakah pembangunan infrastruktur yang kami lakukan berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rahmat Hamdani selaku Tim PDTI (Pendamping Desa Teknik Infrastruktur) desa Bahung Huluan pada hari Rabu 08 Mei 2024 yang menyatakan bahwa:

“Dalam pembangunan infrastruktur yang terlibat adalah masyarakat desa dan pemerintah desa. Semua akan terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. BPD dan pemerintah desa selalu berkoordinasi terkait dengan bangunan apa yang akan dibangun dan materialnya dalam pembangunan infrastruktur. Sejauh ini koordinasi yang dilakukan sudah baik”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syafrudin selaku Kaur Pembangunan Desa Bahung Hulan pada hari Jum'at 10 Mei 2024 yang menyatakan bahwa:

“Dalam pembangunan infrastruktur yang terlibat ada masyarakat secara langsung, Tim Pelaksana Kegiatan dan Pemerintah Desa Bahung Hulan. Usulan pembangunan ataupun perencanaan pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan bestek. Koordinasi yang dilakukan BPD kepada pelaksana pembangunan infrastruktur sejauh ini juga baik, mereka saling kontrol dan koordinasi terkait pembangunan yang dijalankan. Dalam pemecahan masalah jika dalam praktiknya pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan yang direncanakan akan dimusyawarahkan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andi Priyanto selaku tokoh masyarakat Desa Bahung Hulan pada hari Jum'at 10 Mei 2024 yang menyatakan bahwa:

“ Biasanya dalam koordinasi untuk perencanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan di desa kita ini, pemerintah desa dan masyarakat harus ikut serta agar terwujud pembangunan desa yang terealisasi dengan baik, biasanya kalau saya sendiri saya selalu ikut serta ,tetapi banyak juga masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur ini Apabila dalam pelaksanaan pembangunan ditemukan masalah maka akan dimusyawarahkan kembali bersama pemerintah desa, setelah itu barulah menghasilkan sebuah keputusan atas permasalahan yang terjadi.”

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para narasumber dapat disimpulkan bahwa adanya koordinator dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Hulan. Maujana Nagori sudah menjalankan fungsinya masing-masing. Maujana Nagori sudah bertugas menjalankan fungsi perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Kemudian pemerintah desa dalam hal ini kepala desa selaku pemegang penuh kuasa anggaran masih

belum bertugas dengan baik. Kepala desa masih kurang terbuka dan membuka musyawarah dengan Maujana Nagori apabila dalam pembangunan, bangunan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kepala desa juga terkesan otoriter dalam mengambil keputusan, dan kurang mengikuti peraturan yang ada.

## **4.2. Pembahasan**

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang fungsi koordinasi Kelompok Maujana Nagori (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di Desa Bahung Huluan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis terhadap permasalahan yang ingin dijawab, berikut ini penulis uraikan hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

### **1. Adanya Kesatuan Tindakan**

Kesatuan tindakan adalah inti daripada sebuah koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha ataupun tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam sebagai kelompok dimana mereka bekerja sama.

Menurut Sugandha (2015:18) Kesatuan tindakan adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan

mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Menurut kesatuan tindakan pada hakekatnya memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dari tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya. Oleh sebab itu, agar anggota dan satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri maka dibutuhkanlah kesatuan tindakan

Berdasarkan teori tersebut peneliti menilai bahwa koordinasi yang dilakukan Maujana Nagori (BPD) desa Bahung Huluan terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa sudah berjalan dengan baik. Karena Maujana Nagori terus melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa dan pelaksana pembangunan Hasibuan (2011:88).

Sebagaimana diuraikan pada penyajian data yang menguraikan tentang hasil penelitian kepada para narasumber dalam kaitannya dengan hasil wawancara koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa kesatuan tindakan antara BPD, pemerintahan desa, PDTI (Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur), dan masyarakat desa selalu dilakukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber Bapak Udin Bahri Manungkalit, Bapak Anuar Damanik, Bapak Rahmat Hamdani, Bapak Syafrudin dan Bapak Andi Priyanto pada 08-10 Mei 2024 selaku ketua BPD, Kepala Desa, PDTI, Kaur Pembangunan dan tokoh masyarakat di desa Bahung Huluan yang mengatakan bahwa kesatuan tindakan antara Kelompok Anggota Mauajan Nagori, aparat desa dan pelaksana pembangunan sudah berjalan dengan baik. Karena

Anggota Maujan Nagori, aparat desa dan pelaksana pembangunan selalu berkoordinasi mulai dari proses perencanaan pembangunan hingga masa pembangunan selesai. Maujana Nagori dan pemerintah desa selalu mensosialisasikan dan menggali aspirasi masyarakat tentang pembangunan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya pada tahap penetapan pembangunan, Maujana Nagori, pemerintah desa, dan masyarakat akan memutuskan pembangunan berdasarkan anggaran yang tersedia dan rencana anggaran yang sudah ada sebelumnya. Pada tahap pembangunan, masyarakatlah yang akan membangun pembangunan tersebut berdasarkan lokasi masing-masing. Karena pembangunan yang dilaksanakan sendiri bersifat swa kelola. Kemudian Maujana Nagori dan pemerintah desa akan mengawasi proses pembangunan agar sesuai dengan yang direncanakan. Apabila dalam praktiknya masih ada pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana, maka Maujana Nagori dan pemerintah desa akan musyawarah kembali untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam proses penyelesaian masalah, pemerintah desa masih kurang melibatkan Maujana Nagori dalam mengambil keputusan. Kepala desa selaku pemegang kekuasaan juga kurang mengikuti prosedur pemecahan masalah yang sudah ada, dan lebih sering memilih cara aman.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas antara hasil penelitian dikaitkan dengan teori dari kesatuan tindakan dapat diambil kesimpulan bahwa Maujana Nagori (BPD) sudah melakukan kesatuan tindakan yang baik dengan pemerintahan desa dalam hal penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa. Walaupun pemerintah desa masih bersifat sebaliknya. Masih kurang

terbukanya pemerintah desa terhadap masalah pembangunan yang dilakukan. Padahal dibutuhkan simbiosis mutualisme atau saling keterbukaan dalam bekerjasama diantara kedua lembaga desa ini, agar pembangunan yang dilakukan dapat efektif dan efisien.

## **2. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian**

Menurut Sugandha (2014:101) bahwa prinsip koordinasi adalah adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama. Berdasarkan teori tersebut peneliti menilai bahwa kesepakatan dan kesatuan pemahaman tentang penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para narasumber. Maujana Nagori dan pemerintah desa dalam mengambil kesepakatan dan pemahaman dimulai dari tingkat bawah, yaitu musyawarah dusun kemudian dibawa kedalam musyawarah desa. Selanjutnya didalam musyawarah desa untuk mengambil kesepakatan dan keputusan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan didasarkan pada RPJMdes dan anggaran yang tersedia.

Pengertian lain koordonasi adalah proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang ditetapkan dan di sisi lain, keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain, Ndraha (2013:291).

Walaupun dalam praktiknya masih ada masyarakat yang belum memahami makna pembangunan yang sebenarnya. Sehingga usulan pembangunannya belum

sesuai dengan yang rencanakan. Dengan itu maka Maujana Nagori dan pemerintah desa terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar kedepan masyarakat semakin paham makna pembangunan yang diusulkan dan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas bahwa antara hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori dari adanya kesepakatan dan kesatuan pemahaman mengenai sasaran yang harus dicapai oleh Maujana Nagori dalam pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Hulan dapat diambil kesimpulan bahwa Maujana Nagori sudah menjalankan tugas dengan baik, bahwa Maujana Nagori sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat secara langsung dan berkoordinasi ke pemerintahan desa mengenai pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan. Hal ini dapat mempermudah pemerintah desa dalam memutuskan pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang sudah direncanakan dan anggaran yang tersedia.

### **3. Adanya ketaatan dan loyalitas**

Menurut Sugandha (2014:101) bahwa prinsip koordinasi adalah adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori tersebut peneliti menilai bahwa ketaatan dan loyalitas Maujana Nagori dan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara kepada narasumber bahwa para aparatur pemerintahan dan masyarakat sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing. Maujana Nagori sendiri sudah menjalankan tugasnya sebagai

fungsi pengawasan pembangunan di desa dan proses perencanaan pembangunan. Sedangkan pemerintah desa sudah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai badan pelaksana pembangunan. Kemudian masyarakat sudah menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pelaksana pembangunan yang dilaksanakan.

Menurut Griffin dalam Hurriyati (2014:128) mengatakan bahwa "*loyalty is defined as on random purchases expressed over time by some decision making gun it*". Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa loyalitas lebih ditunjuk kepada suatu perilaku, yang ditunjukkan dengan pembelian rutin, didasarkan pada unit pengambilan keputusan.

Pemerintah desa dan masyarakat juga komitmen dalam melaksanakan pembangunan agar sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan yang dilakukan mempunyai makna dari masyarakat untuk masyarakat. Sehingga masyarakat dalam pelaksanaannya cukup semangat dan antusias dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Hulan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas bahwa antara hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori dari adanya ketaatan dan loyalitas terhadap tugas masing-masing dalam pembangunan infrastruktur di desa Bahung Hulan dapat diambil kesimpulan bahwa Maujana Nagori sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai lembaga yang mengawasi proses pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat dilihat dari Maujana Nagori terlibat langsung dalam mengawasi dan mengingatkan parapelaksana pembangunan agar menjalankan pembangunan

infrastruktur sesuai dengan yang direncanakan. Tetapi yang menjadi masalah adalah masih kurang patuhnya kepala desa dalam menjalankan proses pembangunan yang ada. Ditambah lagi masih seringnya tumpang tindih pelaksanaan pembangunan yang ada. Masyarakat juga kurang aktif dalam mengawasi pembangunan yang ada, sehingga berdampak pada masih adanya pembangunan yang kurang sesuai dengan yang direncanakan.

#### **4. Adanya Koordinator**

Prinsip dari adanya koordinator atau pemimpin yaitu yang menggerakkan dan memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dalam organisasi dan mengerti serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Menurut Sugandha (2014:35) adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerja sama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama.

Berdasarkan teori tersebut peneliti menilai bahwa para koordinator sudah menjalankan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sudah baik, karena sudah menjalankan fungsi masing-masing. Maujana Nagori (BPD) selaku lembaga perencana dan pengawas pembangunan sudah menjalankan tugas sesuai dengan seharusnya. Maujana Nagori selalu terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari sosialisasi dan penggalan aspirasi masyarakat tentang pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan. Kemudian Maujana Nagori akan membawanya pada musyawarah desa dan diputuskan mana pembangunan yang akan dilakukan. Pada proses pembangunan Maujana Nagori terlibat langsung dalam pengawasan dengan cara melihat pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dan mengingatkan kepada pelaksana pembangunan agar bangunan sesuai dengan yang sudah dianggarkan dan direncanakan Handayani (2011:88) mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (leadership) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi.

Kepala Desa sudah bertugas sebagai fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa. Dalam pembangunan infrastruktur Kepala Desa terlebih dahulu Berkoordinasi dengan Ketua Maujana Nagori untuk mengadakan pertemuan atau rapat dengan LPM, dan Masyarakat untuk membahas mengenai masalah pembangunan guna untuk kepentingan bersama dan demi kemajuan desa Bahung Huluan, sebelum menjalankan pelaksanaan pembangunan ini pemerintah desa harus mempunyai kesepakatan bersama sehingga tidak adanya kesalahpahaman antara pemerintah desa dan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas bahwa antara hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori dari adanya koordinator dapat diambil kesimpulan bahwa Maujana Nagori sudah menjalankan fungsinya dengan baik dalam mengawasi pelaksana pembangunan agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Walaupun kepala desa selaku pemegang kuasa anggaran masih kurang terbuka terhadap pelaksanaan pembangunan. Seharusnya kepala desa sebagai pelaksana pembangunan harus mengikuti prosedur pembangunan sesuai dengan per Undang-Undangan. Kepala desa tidak boleh bersifat sepihak dalam menyelesaikan dan memutuskan masalah dalam pembangunan. Dan masih kurangnya pemahaman perangkat desa dalam pelaksanaan pembangunan sehingga mengganggu proses pembangunan. PDTI

(Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur) juga masih efektif dalam perencanaan pembangunan. Jelas ini dapat mengganggu proses pembangunan jika pelaksana pembangunan ini kurang maksimal menjalankan tugasnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Maujana Nagori (BPD) Desa Bahung Huluan sudah menjalankan kesatuan tindakan dengan baik dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa. Maujana Nagori (BPD) Desa Bahung Huluan sudah menjalankan kesepakatan dan kesatuan pemahaman dengan baik dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa. Maujana Nagori (BPD) Desa Bahung Huluan sudah menjalankan ketaatan dan loyalitas pelaksana pembangunan infrastruktur agar sesuai dengan yang sudah direncanakan. Maujana Nagori (BPD) Desa Bahung Huluan sudah menjalankan koordinasi dengan baik dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa, tetapi di samping itu, Pemerintah desa masih kurang terbuka kepada Maujana Nagori (BPD) Desa Bahung Huluan dalam pemecahan masalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Pemerintah desa tidak mengikuti prosedur pemecahan masalah apabila pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan Kelompok Maujana Nagori yakni dalam hal menyusun dan merencanakan pembangunan untuk dibahas bersama. Kemudian menerima dan melaksanakan pembangunan desa yang berasal dari aspirasi dan keinginan masyarakat desa. Adapun faktor penting berjalannya koordinasi yang dilakukan Maujana Nagori (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Huluan. dapat dilihat dari

adanya kesatuan tindakan diantara Maujana Nagori (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Huluan., pemerintah desa dan pelaksana pembangunan. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai. Adanya ketaatan dan loyalitas terhadap tugas masing-masing. Adanya koordinator yang bertugas memimpin dan menggerakkan serta memonitor tujuan yang dicapai. Adapun masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi yang dilakukan Maujana Nagori (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Huluan. dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Huluan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi koordinasi Maujana Nagori (BPD) dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Huluan. Dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa di desa Bahung Huluan berada pada kriteria penilaian cukup baik

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Fungsi koordinasi kelompok maujana nagori dalam menetapkan skala prioritas pembangunan infrastruktur di desa Bahung Huluan. Maka dapat dikemukakan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Maujana Nagori (BPD) harus meningkatkan kesatuan tindakan kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa.

2. Maujana Nagori (BPD) harus meningkatkan kesepakatan dan kesatuan pemahaman dengan pemerintah desa berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa.
3. Maujana Nagori (BPD) harus meningkatkan ketaatan dan loyalitas pelaksana pembangunan, agar pembangunan yang dilaksanakan efektif dan efisien.
4. Maujana Nagori (BPD) harus meningkatkan koordinasinya agar penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa berjalan dengan baik dan sesuai yang direncanakan.
5. Pemerintah desa harus lebih terbuka kepada Maujana Nagori (BPD) dan masyarakat desa tentang pembangunan yang dilakukan.
6. Pemerintah desa harus patuh dan taat pada undang-undang yang sudah mengatur mekanisme pemerintahan, agar pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia
- Azhari, Rida. 2017. *Koordinasi Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung*. ISSN 2477-2458:543-556
- Budiman, Arief. 2016. *Teori Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Denim, sudarwan. 2013. *Menjadi peneliti kualitatif*. Bandung : Cv. Pustaka Setia
- Gianjar, Moejiarto, 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Handoko, T. Hani. 2016. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Handayani, Soewarno. 2011. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. cetakan Ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara
- Harriyati, Ratih. 2014. *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*. Bandung: Alfabeta.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Syafie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta
- Syafrizal, S., & Martinelli, I. (2023). Etnik Melayu Dalam Setting Budaya Lokal Tepak Sirih Sebagai Simbol Perlawanan (Tinjauan Sosiobudaya). *Jurnal*

*Administrasi Publik Dan Kebijakan (Japk)*, 3(1), 37–4.

- Siagian. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugandha, Dann.2014. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Organisasi*. Jakarta: Intermedia
- Suharto, Prodjowijono. 2012. *Manajemen : Sebuah Laternatif*. Jakarta : Gunung Mulia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- , 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitattif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutarto, 1984. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: BPFE
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Thoha, Miftah. 2012. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Wijayanto, Dian. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyuni, Tri. 2009. *Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap Produktivitas Ekonomi di Indonesia*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

### **Undang-Undang :**

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Undang – Undang No32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Permen No 43 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Pemerintah Desa dan BPD



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dilarang menyalin atau menjiplak isi surat ini agar disebarkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/II/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6622400 - 6622467 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fslp.umsumedan.ac.id> fslp@umsumedan.ac.id @umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Medan, 8 JANUARI 2024

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : NILAM PERMATA DEWI DAMANIK  
NPM : 2003100055  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
SKS diperoleh : 1330SKS, IP Kumulatif 3,60

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Fungsi Coordinating kelompok Majelis Nagori dalam Menetapkan Prioritas skala Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bahung Hullan Kabupaten Simalungun	<u>6/8 2024 AC.</u>
2	Manajemen BUMDES dalam meningkatkan Pendapatan Petani Karet Di Desa Bandar Betsy Kabupaten Simalungun	
3	Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kualitas Karang Taruna di Desa Bahung Hullan Kabupaten Simalungun	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SFP tahap berjaian;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tanggal 8 JANUARI 2024

Ketua

Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

(.....)  
NIDN:

PB: KHAIDIR ALI

(08)

(NILAM PERMATA DEWI DAMANIK)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

(KHAIDIR ALI, S. S. S. MPA)  
NIDN: 0104089401



Agensi Kelayakan Malaysia  
Malaysia Qualifications Agency



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
 DAN PEMBIMBING  
 Nomor : 62/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **08 Januari 2024**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **NILAM PERMATA DEWI DAMANIK**  
 N P M : 2003100055  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024  
 Judul Skripsi : **FUNGSI COORDINATING KELOMPOK MAUJANA NAGORI  
 DALAM MENETAPKAN PRIORITAS SKALA PEMBANGUNAN  
 INFRASTRUKTUR DI DESA BAHUNG HULUAN KABUPATEN  
 SIMALUNGUN**

Pembimbing : **KHAIDIR ALLI, S.Sos., M.PA.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 008.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 08 Januari 2025.**

Ditetapkan di Medan,  
 Pada Tanggal, 28 Djumadil Akhir 1445 H  
 10 Januari 2024 M

Dekan,  
  
**Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.**  
 NIDN. 0030017402



**Tembusan :**

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menewab surat ini agar ditubuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XII/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
Website: <https://fisp.umsu.ac.id> Email: [fisp@umsu.ac.id](mailto:fisp@umsu.ac.id) Instagram: @umsumedan Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 5 Maret ..... 2024

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : NILAM PERMATA DEWI DAMANIK  
N P M : 2003100055  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/II.3.AU/UMSU-03/F/20..... tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

FUNGSI COORDINATING KELOMPOK MAJANA HAGORI  
DALAM MENETAPKAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA BAHUNG HULUAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

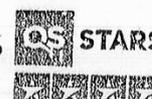
1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

Pemohon,

( KHAIDIR. ALL.S.SOF., MPA. )NIDN: 0104089401( NILAM PERMATA D. DAMANIA )



**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 431/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Hari, Tanggal : Kamis, 07 Maret 2024  
 Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
 Tempat : Laboratorium FISIP UMSU  
 Pemimpin Seminar : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**



**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Berprestasi

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
13	NEYS	2003100042	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	PERAN PELAYANAN PARTISIPATIF DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNGPINANG
14	ZAHWA REZA NAFIZA SARI	2003100023	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM POSYANDU BALITA DI DESA SEKIP KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG
15	RINI ASTUTI	2003100045	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	EFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM MENGURANGI RESIKO STUNTING
16	NABILA MUNTAZA NASUTION	2003100066	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL LURAH DALAM PROGRAM SERAM (SESER SAMPAH MALAM) DI KELURAHAN HELVETIA TENGAH KECAMATAN MEDAN HELVETIA KOTA MEDAN
17	NILAM PERWATA DEWI DAMANIK	2003100055	AFFAN AL-QUDEUS, S.Sos., M.Si.	KHALDIR ALI, S.Sos., MPA.	FUNGSI COORDINATING KELOMPOK MAJUJANA NAGORI DAL 4M MENETAPKAN PRIORITAS SKALA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BAHUNG HULUAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Medan, 24 Sya'ban 1445 H  
 05 Maret 2024 M





PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
**NAGORI BAHUNG HULUAN**  
 JALAN MASJID BESAR, 21155

**SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 400.10.2.2 / 103 / BII / 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini Pangulu Bahung Huluan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : NILAM PERMATA DEWI DAMANIK  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat/Tgl Lahir : Bahung Huluan , 27 – 06 – 2003  
 Status Perkawinan : Belum Kawin  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
 Alamat : Huta III Bahung Huluan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab.Simalungun  
 Nomor NIK : 1208176707030001

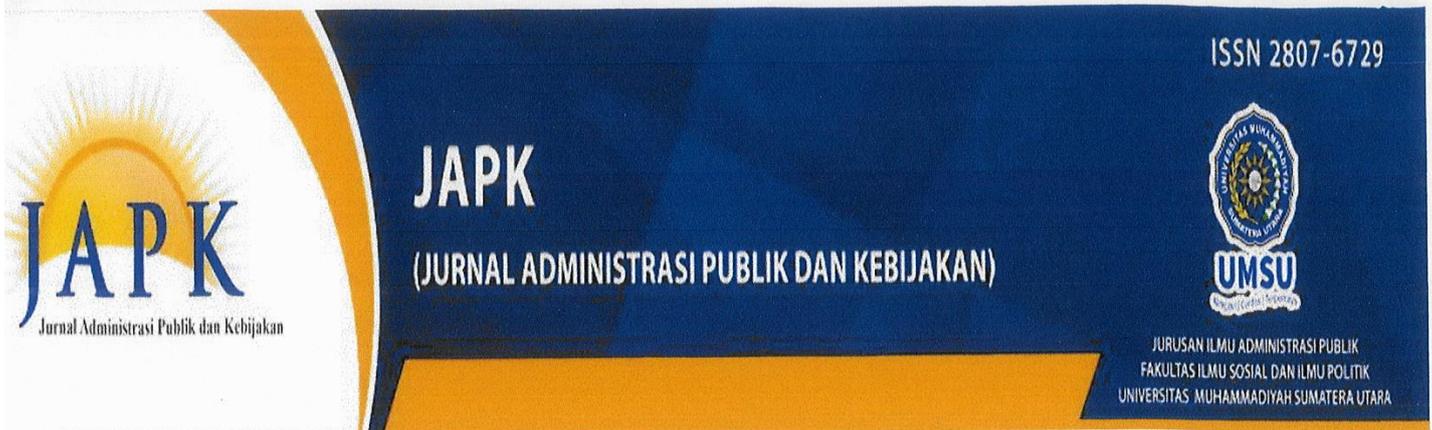
Benar nama tersebut diatas adalah penduduk Huta III Bahung Huluan, Nagori Bahung Huluan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun yang kami ketahui hanya benar berkelakuan baik tidak pernah tersangkut perkara kejahatan ataupun tindak pidana criminal, telah melaksanakan penelitian Mahasiswa berkaitan dengan judul *skripsi yang bersangkutan tentang FUNGSI KOORDINASI BPD ( BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA ) DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR NAGORI BAHUNG HULUAN*.

Dengan mewawancarai pemerintahan Nagori Bahung Huluan dan beberapa tokoh Masyarakat terkait.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nagori Bahung Huluan  
 Pada Tanggal : 14 Mei 2024





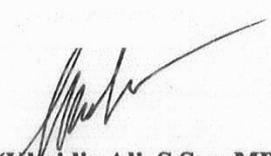
## LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

**Dear Ms. Nilam Permata Dewi Damanik**

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Fungsi Coordinating Kelompok Maujana Nagori Dalam Menetapkan Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bahung Hulan Kabupaten Simalungun*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 4 No 1 Juny (2024). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

**Medan, May 27, 2023**

Editor In Chief

  
**(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)**  
**NIDN. 0104089401**

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018  
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567  
 NPP. 1271202D1000003 ☎ <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id) 🌐 [perpustakaan\\_umsu](#)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 01131/KET/II.5-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : NILAM PERMATA DEWI DAMANIK  
**NPM** : 2003100055  
**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
**Jurusan/ P.Studi** : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 19 Zulqaidah 1445 H  
 27 Mei 2024 M

Kepala Perpustakaan,

  
 Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UMSU**  
 Cerdas | Terpercaya

UMSJ Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mu'htar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
 https://iisip.umsu.ac.id | iisip@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

**PERITAKAN ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Sk-5

Nama Lengkap : ~~Nilam~~ **NILAM PERMATA DEWI DAMANIK**  
 N P M : **2003100055**  
 Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
 Judul Skripsi : **FUNGSI COORDINATING KELOMPOK MAJLIS NAGORI DALAM MENETAPKAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BAHUNG HULUAN KABUPATEN SIMALUNGUN**

No.	Tanggal	Kegiatan Advisi/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	29/02/2024	Revisi latar belakang masalah, uraian teoritis, metode penelitian, Kerangka konsep	
2.	1/02/2024	Revisi latar belakang, Rumusan Masalah	
3.	4/02/2024	Revisi latar belakang, Kerangka konsep	
4.	15/03/2024	Revisi latar belakang, Uraian teoritis	
5.	15/03/2024	Revisi latar belakang.	
6.	10/03/2024	ACC Seminar proposal.	
7.	26/03/2024	Bimbingan draft kuesioner	
8.	16/05/2024	Bimbingan hasil penelitian	
9.	21/05/2024	Revisi hasil penelitian dan pembahasan	
10.	22/05/2024	Revisi Pembahasan, kesimpulan dan saran	
11.	27/05/2024	ACC SKRIPSI	



(Dr. Arif Salsah, S.Sos.,MSP.)  
 NIDN: 0030017402

Medan, 27 Mei 2024.

Ketua Program Studi,  
  
 (Ananda Mahardiana, S.Sos.,MSP)  
 NIDN: 0122 118801

Pembimbing,  
  
 (Khair Ali Ssos M.P.A.)  
 NIDN: 0104 089401



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Data Pribadi**

Nama : NilamPermata Dewi Damanik  
Tempat dan tanggal lahir : Bahung Huluan 27 Juli 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia

---

Alamat : Bahung Huluan Kabupaten Simalungun  
Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara  
Email : nilampermatadewi045@gmail.com

**Nama Orang Tua**

Nama Ayah : Juanda Abdullah Damanik  
Nama Ibu : Saminah  
Alamat : Bahung Huluan Kabupaten Simalungun

**Pendidikan Formal**

1. SD Negeri 094127 Bahung Kahean
2. SMP Negeri 1 Dolok Batu Nanggar Serbelawan
3. SMA Swasta Muhammadiyah 07 Serbelawan
4. Tahun 2020-2024, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Mei 2024

**NILAM PERMATA DEWI DAMANIK**